

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SOCIAL WELFARE FOR HOMELESS PERSONS AND BEGGARS

Tridita Yuniar Utami Tuarita^{1*}, Denny Hernawan², Neng Virly Apriliyani³, Rusliandy⁴,
Cecep Wahyudin⁵, Euis Salbiah⁶, Faisal Tri Ramdani⁷, Akhmad Munjin⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor-Indonesia

*Korespondensi: Tridita Yuniar Utami Tuarita. Email: yuniartridita@gmail.com

(Diterima: 06-09-2024; Ditelaah: 24-09-2024; Disetujui: 01-10-2024)

ABSTRACT

Targeted policies and programs that consider the needs of the community must be supported by government efforts to establish appropriate policies. Effective policies are essential for ensuring that programs can be implemented successfully. The purpose of this study is to assess the effectiveness and efficiency of the policy for handling social welfare services for the homeless and beggars at the Social Service Office of Bogor City. This research utilizes a policy implementation theory consisting of four main components: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. A descriptive quantitative analysis approach is employed in this study. Data were collected through field observations and questionnaires distributed to 24 respondents. For data analysis, the Weight Mean Score (WMS) formula was used, and measurement was conducted using a Likert scale. The results indicate that the communication dimension scored 4.81, categorized as very good; the resource dimension scored 4.61, also categorized as very good; the disposition dimension scored 4.25, categorized as very good; and the bureaucratic structure dimension scored 4.65, categorized as very good. Consequently, the overall score for the policy implementation assessment was 4.58, categorized as very good. It is hoped that this research will assist the Social Service Office of Bogor City in evaluating or reconsidering the policies for handling social welfare services for the homeless and beggars in Bogor city.

Key Words: Beggars, Homelessness, Policy Implementation, Social Welfare.

ABSTRAK

Kebijakan dan program yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat harus didukung oleh upaya pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat sasaran diperlukan agar program dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien kebijakan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan terdiri dari empat komponen utama yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Analisis kuantitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan kuesioner yang dibagikan kepada 24 responden. Dalam proses analisis data, digunakan metode analisis yaitu rumus Weight Mean Score (wms), lalu untuk mengukur menggunakan skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi 4,81 dengan kategori sangat baik, dimensi sumber daya 4,61 dengan kategori sangat baik, dimensi disposisi 4,25 dengan kategori sangat baik, dan dimensi struktur birokrasi 4,65 dengan kategori sangat baik. Dengan demikian, hasil penelitian terkait implementasi kebijakan mendapat penilaian 4,58 dengan kategori sangat baik. Diharapkan penelitian ini akan membantu Dinas Sosial Kota Bogor mengevaluasi atau mempertimbangkan kebijakan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis di Kota Bogor.

Kata kunci: Kesejahteraan Sosial, Implementasi Kebijakan, Gelandangan, Pengemis

PENDAHULUAN

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus aplikatif dalam konteks kehidupan masyarakat. Proses penyusunan kebijakan perlu dijabarkan secara cermat, dimulai dari penyusunan agenda untuk mengumumkan peraturan publik yang relevan dan berdaya guna. Dalam menentukan kebijakan harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tahapan krusial adalah formulasi, di mana masalah-masalah penting dalam lingkup sosial diidentifikasi. Pemerintah, sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab penuh atas legitimasi dan pelaksanaan proses penyusunan kebijakan. Tahap berikutnya adalah implementasi, yang merupakan kelanjutan dari proses penentuan kebijakan. Setelah itu, dilakukan tahap evaluasi kebijakan. Pada fase ini, regulasi yang telah diterapkan kemudian diamati dan diukur efektivitasnya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban penyediaan layanan dasar sosial kepada warga, Pemda Kota Bogor telah mengesahkan Perda No. 4 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Masalah ini masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Kota Bogor hingga saat ini. Persoalan kesejahteraan muncul akibat individu atau kelompok yang tidak mampu menjalankan peran sosialnya secara layak dan normal karena faktor kemiskinan, keterlantaran, atau disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat, pihak yang berwenang menawarkan jalan keluar dengan menyusun regulasi terkait isu kesejahteraan sosial melalui Permensos No. 5 Tahun 2019. Masyarakat yang terdata akan terdaftar sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Salah satu masalah sosial yang harus ditangani oleh pemerintah daerah adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS). Fakta bahwa banyak anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan wanita rawan dari segi sosial ekonomi mengindikasikan masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Salah satu tujuan utama setiap individu adalah terjaminnya kesejahteraan sosial. Di mana terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan terciptanya situasi yang aman dan tentram dalam kehidupan sekitar merupakan kunci penting untuk tercapainya kesejahteraan sosial (Fadri, 2019; Kuntari & Hikmawati, 2017).

Kesejahteraan sosial tersebut tidak tersedia untuk semua orang. Di setiap daerah di Indonesia, masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi masalah yang kompleks. Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah PPKS ini. Masalah kesejahteraan sosial ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum dapat menikmati hak atas kebutuhan dasar secara layak akibat ketidakmampuan mereka untuk mengakses pelayanan pemerintah. Meskipun demikian, pembangunan kesejahteraan sosial pada haknya merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan keturunannya, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta turut serta berkontribusi terhadap terciptanya tatanan global berbasis kemerdekaan, abadi, dan keadilan sosial (Rosiana, 2017; Bedasari & Wahyuni, 2020).

Salah satunya gelandangan dan pengemis, yang merupakan kelompok rentan yang kurang beruntung dan beresiko tinggi menghadapi berbagai persoalan sosial. PPKS gelandangan dan pengemis sering diabaikan dan dianggap sebagai bagian dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Padahal, PPKS gelandangan dan pengemis juga

berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah.

Dinas Sosial Kota Bogor sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan PPKS gelandangan dan pengemis telah menetapkan kebijakan penanganan berupa pemberian bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pemberian tempat tinggal sementara. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum dievaluasi secara komprehensif terkait efektivitas dan efisiensinya.

MATERI DAN METODE

Secara etimologis Menurut penjelasan Solichin Abdul Wahab(2008), implementasi dalam kamus Webster diartikan sebagai proses merealisasikan atau mewujudkan sesuatu. Dijelaskan bahwa konsep implementasi berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris "*to implement*" yang berarti melaksanakan atau mengimplementasikan suatu hal dengan menyediakan sarana atau fasilitas yang diperlukan agar pelaksanaannya dapat terlaksana. Juga diartikan sebagai memberikan dampak nyata terhadap suatu objek. Sesuatu yang dapat direalisasikan untuk memberikan dampak tersebut dapat berupa berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Nurdin Usman (2022) Implementasi digambarkan sebagai sesuatu yang berpuncak pada aktivitas, atau keberadaan mekanisme sistem. Implementasi lebih dari sekadar aktivitas, yang merupakan usaha terencana yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Nugroho (2004) menjelaskan bahwa model manajemen pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan dalam konteks manajemen yang meliputi unsur pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Setelah suatu kebijakan dikembangkan, tugas selanjutnya adalah mengatur tahapan pelaksanaan, menunjuk pemimpin untuk memandu pelaksanaan,

serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, Nugroho mendeskripsikan bahwa implementasi suatu kebijakan dalam perspektif manajemen melibatkan proses pengorganisasian, pemberian arahan kepemimpinan, serta pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan guna memastikan berlangsungnya pelaksanaan sesuai rencana (Therasari, et al., 2024; Fitriyana, et al., 2024; Farhati, et al., 2024).

Menurut Sirajuddin (2016), kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat umum disebut kebijakan publik. Kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik atau yang disebut stakeholder adalah pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kelemahan suatu kebijakan dapat teridentifikasi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, sedangkan keberhasilan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, Sirajuddin menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat untuk masyarakat berdasarkan masalah yang dihadapi, pembuatnya adalah pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat, serta kriteria keberhasilannya dapat dinilai dari outcome setelah implementasi.

Alam (2012) Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan komponen integral dari komoditas politik yang terkait dengan kepentingan publik. Kebijakan tersebut dapat dimodifikasi ketika terjadi dinamika yang mempengaruhinya. Akibatnya, kebijakan publik bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan kemajuan pembangunan.

Menurut lester dan Stewart dalam Agustino (2008) terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan, yaitu

pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up.

1. Pendekatan top-down

Pendekatan ini berakar pada perspektif bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat. Pendekatan ini berfokus pada sejauh mana tindakan pelaksana kebijakan selaras dengan prosedur dan tujuan yang digariskan oleh pembuat kebijakan pusat. Pertanyaan kunci dalam pendekatan ini adalah seberapa dekat implementasi tersebut mematuhi desain kebijakan awal.

2. Pendekatan bottom-up

Pendekatan ini dimulai dengan melibatkan semua pegawai sektor publik dan swasta dalam implementasi program. Pendekatan ini mempertimbangkan tujuan, strategi, dan jaringan kontak pribadi dan organisasi mereka. Menurut Tachjan (2006), kekuatan pendekatan bottom-up terletak pada fokusnya pada hubungan formal dan informal yang membentuk jaringan kebijakan yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan

Menurut George C. Edward yang dikutip oleh Dwiyanto indiahono pada tahun 2017, masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan. Menurut Edward, efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yakni tentang cara menyampaikan kebijakan kepada organisasi dan masyarakat. Ketersediaan sumber daya, sikap dan tanggapan pihak terkait, serta struktur organisasi pelaksana. Ada tiga indikator untuk mengukur variabel komunikasi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumber daya, yakni mendukung kebijakan dengan sumber daya manusia dan finansial memadai. Ada empat indikator untuk menilai kelancaran sumber daya:

staff/pegawai, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3. Disposisi, yakni karakteristik pelaksana terkait kebijakan/program. Agar berhasil secara efektif dan efisien, pelaksana harus memahami, mampu, dan berkemauan melaksanakan kebijakan tanpa bias. Dua hal penting pada dimensi adalah: pengangkatan birokrat dan insentif.
4. Struktur Birokrat, yakni mekanisme dan struktur pelaksana. Meski sumber mencukupi dan pelaksana memahami tugas, implementasi bisa tidak efektif karena ketidakefisienan struktur. Dua karakteristik yang meningkatkan kinerja: SOP dan fragmentasi. *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi.

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:18), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini biasanya digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel secara acak. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, dan analisis datanya bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan menguji hipotesis. Menurut Sugiyono (2019:11), penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel independen, baik satu atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

Populasi penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Bogor bidang Rehabilitasi Sosial. Menurut Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah umum yang terdiri atas objek/subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang diteliti peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 24 orang. Tabel 1 adalah jumlah sampel pada penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Sampel

Responden	Populasi
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1
Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia, Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.	1
Pekerja Sosial Ahli Muda 1	1
Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	1
Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	1
Pekerjas Sosial 1	1
Tim Reaksi Cepat (TRC)	18
Total	24

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bogor

Data pada tabel diatas didapatkan melalui observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik sampling jenuh atau sampling sensus termasuk kedalam kategori Non Probability sampling.

Data pada tabel diatas diperoleh melalui observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah teknik penetapan sampel dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel jenuh sampling sensus termasuk dalam kategori pengambilan Nonprobability sampling. Artinya, data diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Peneliti mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability yaitu sampel jenuh.

Total populasi pegawai Dinas Sosial Kota Bogor di Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebanyak 24 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, yang berarti seluruh populasi diambil sebagai sampel penelitian. Dengan kata lain, jumlah responden atau sampel penelitian adalah sama dengan jumlah

populasi, yakni sebanyak 24 orang pegawai Dinas Sosial Kota Bogor di Bidang Rehabilitasi Sosial.

Menurut Sugiyono (2011: 308), Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Studi lapangan (*field research*)
 Untuk mencari dan memperoleh informasi secara langsung dari instansi yang diteliti yaitu Dinas Sosial Kota Bogor, dilakukan:
 - a Kuesioner (angket) berupa seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab.
 - b Wawancara dengan pimpinan dan pegawai Dinas Sosial Kota Bogor terkait obyek penelitian.
 - c Observasi dengan mengamati dan mencatat aktivitas objek penelitian dan melakukan kunjungan lapangan
2. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, menelaah dan merangkum isi buku terkait topik penelitian.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis data dengan menggunakan rumus Weight Mean Score (wms) Lalu untuk mengukur menggunakan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Kebijakan Penanganan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sosial bagi masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kota Bogor, tepatnya Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan

PPKS gelandangan dan pengemis telah menetapkan kebijakan penanganan berupa pemberian bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pemberian tempat tinggal sementara.

Tabel 2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Per Tahun

Tahun	Periode	Jumlah
2015	Januari - Desember	456
2016	Januari - Desember	520
2017	Januari - Desember	580
2018	Januari - Desember	237
2019	Januari - Desember	313
2020	Januari - Desember	86
2021	Januari - Desember	85
2022	Januari - Desember	125
2023	Januari - Desember	363
2024	Januari - Mei	42

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor

Data diatas merupakan gambaran penting implementasi kebijakan penanganan PPKS gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Bogor guna mengendalikan jumlah gepeng yang tidak bisa diprediksi oleh Dinas Sosial Kota Bogor, contohnya pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan yang cukup drastis imbas dari pasca covid 19.

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Bogor telah berupaya meningkatkan sumber daya pegawai dengan cara memilih pegawai yang potensial untuk menangani lebih dari satu tanggung jawab, namun sebelumnya harus menyepakati jadwal kerjanya. Upaya lain adalah mensosialisasikan program penyuluhan di tempat para gelandangan dan pengemis berada, yang bertujuan mendata dan memberi himbauan. Melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti TNI, POLRI, DISHUB, DLH dan masyarakat juga dilakukan dalam penanganan mereka. Peran masyarakat penting untuk membantu tim tanggap cepat menangani aduan. Demikian upaya Dinas Sosial Kota Bogor meningkatkan

implementasi penanganan gelandangan dan pengemis.

1. Komunikasi

Tabel 2 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Dimensi Komunikasi

No	Item Pertanyaan	Pegawai Dinsos	
		Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Sosialisasi yang Disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bogor	4,87	Sangat Baik
2	Terkait Respon yang Ditunjukkan oleh Dinas Sosial Dalam Menyelesaikan Hambatan	4,87	Sangat Baik
3	Terkait Komunikasi yang Terjalin Antar Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor	4,83	Sangat Baik
4	Terkait Informasi yang Disampaikan Oleh Dinas Sosial Kota Bogor Mudah Dipahami	4,87	Sangat Baik
5	Terkait Kejelasan Informasi yang Disampaikan Oleh Dinas Sosial Kota Bogor	4,91	Sangat Baik
6	Terkait Pelaksanaan Kebijakan Sesuai Dengan Tujuan yang Direncanakan	4,91	Sangat Baik
7	Terkait Konsisten dan Kejelasan Informasi yang Disampaikan Oleh Dinas Sosial Kota Bogor	4,41	Sangat Baik
Jumlah		4,81	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata dimensi komunikasi pada hasil responden Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor yang terdiri dari 7 indikator yaitu memperoleh 4,81 dengan kategori Sangat Baik.

2. Sumber Daya

Tabel 3 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Dimensi Sumber Daya

No	Item Pertanyaan	Pegawai Dinsos	
		Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Kemampuan Sumber Daya Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor	4,91	Sangat Baik
2	Terkait Ketersediaan Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Dalam Melaksanakan Kebijakan	4,75	Sangat Baik
3	Terkait Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Mengetahui Tindakan yang Harus Dilakukan	4,75	Sangat Baik
4	Terkait Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Menginformasikan Kebijakan Sesuai Dengan Peraturan	4,83	Sangat Baik
5	Terkait Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Memiliki Kewenangan dan Tanggung Jawab	4,91	Sangat Baik
6	Terkait Wewenang yang Dimiliki Untuk Mendukung Pelaksanaan Kebijakan	4,79	Sangat Baik
7	Terkait Ketersediaan Fasilitas Untuk Menunjang Pelaksanaan Kebijakan	3,79	Baik
8	Terkait Fasilitas yang Tersedia telah memadai Untuk Menunjang Pelaksanaan Kebijakan	4,12	Baik
Jumlah		4,61	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Dimensi Sumber daya pada hasil responden Pegawai Dinas Sosial Kota

Bogor yang terdiri dari 8 indikator yaitu memperoleh 4,61 dengan kategori Sangat Baik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Bogor evaluasi yang dilakukan terhadap program penanganan PMKS gelandangan dan pengemis yaitu kedepannya akan meningkatkan Sarana Prasarana. Sarana Prasarana yang ada sekarang terbatas, sehingga akan melakukan perbaikan/renovasi. Untuk evaluasi tahun depan akan ada pengadaan mobil ambulans. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Masnul Alim (2023) tentang sumber daya. Dinas Sosial memiliki sumber daya yang terukur dan tanggap dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sumber daya manusia dialokasikan secara tepat pada berbagai bagian dengan kualitas yang memadai. Namun, jumlah sumber daya manusia, khususnya petugas patroli, masih terbatas. Jumlah petugas patroli yang ada hanya 12 orang yang dibagi dalam tiga tim patroli, sehingga belum memadai dalam melaksanakan tugasnya. Prasarana dan sarana yang dimiliki Dinas Sosial untuk mendukung pelaksanaan program PPKS masih belum memadai. Misalnya, belum tersedianya rumah singgah untuk menampung sementara anak jalanan atau warga PPKS lainnya. Selain itu, Dinas Sosial Kota Bogor belum memiliki tempat rehabilitasi. Sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk Satgas PPKS yang bertugas melakukan patroli dan pemantauan anak jalanan di Kota Bogor, seperti kendaraan patroli dan perlengkapan pendukungnya, juga masih sangat minim. Keterbatasan ini menjadi kendala yang cukup berarti dalam operasional di lapangan.

3. Disposisi

Tabel 4 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Dimensi Sumber Daya

No	Item Pertanyaan	Pegawai Dinsos	
		Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Bidang Keuangan Memberlakukan Insentif Diluar Gaji	4,16	Baik
2	Terkait Insentif yang Diberikan Diluar Gaji Memberikan Motivasi	4,16	Baik
3	Terkait Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Memiliki Dedikasi	4,45	Sangat Baik
Jumlah		4,25	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Dimensi Disposisi pada hasil responden Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor yang terdiri dari 3 indikator yaitu memperoleh 4,25 dengan kategori Sangat Baik.

4. Struktur Birokrasi

Tabel 5 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Dimensi Struktur Birokrasi

No	Item Pertanyaan	Pegawai Dinsos	
		Mean	Kriteria Penilaian
1	Terkait Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Telah Memenuhi Standar Minimum yang Dibutuhkan	4,70	Sangat Baik
2	Terkait Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Telah Melaksanakan Kegiatan dan Tanggung Jawab Sesuai dengan SOP	4,83	Baik
3	Terkait Upaya Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Dalam Penyebaran Tanggung Jawab	4,25	Sangat Baik
4	Terkait Upaya Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Dalam Penyebaran Tanggung Jawab	4,83	Sangat Baik
Jumlah		4,65	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Dimensi Struktur Birokrasi pada hasil responden Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor yang terdiri dari 4 indikator yaitu memperoleh 4,65 dengan kategori Sangat Baik.

5. Implementasi Kebijakan

Tabel 6 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Variabel Implementasi Kebijakan

Variabel	Dimensi	Indikator	Pegawai Dinsos	
			Mean	Kriteria
Implementasi Kebijakan George C. Edward (Widodo:2011)	Komunikasi	Transmisi	4,87	Sangat Baik
			4,87	Sangat Baik
			4,83	Sangat Baik
		Kejelasan	4,87	Sangat Baik
			4,91	Sangat Baik
		Konsistensi	4,91	Sangat Baik
		4,41	Sangat Baik	
		Rata-Rata	4,81	Sangat Baik
	Sumber Daya	Staff atau Pegawai	4,91	Sangat Baik
			4,75	Sangat Baik
		Informasi	4,75	Sangat Baik
			4,83	Sangat Baik
		Wewenang	4,91	Sangat Baik
			4,79	Sangat Baik
		Fasilitas	3,79	Sangat Baik
			4,12	Sangat Baik
		Rata-Rata	4,61	Sangat Baik
	Disposisi	Insentif	4,16	Sangat Baik
			4,16	Sangat Baik
		Pengangkatan Birokrat	4,45	Sangat Baik
		Rata-Rata	4,25	Sangat Baik
	Struktur Birokrasi	Standar Operasional Prosedur	4,70	Sangat Baik
			4,83	Sangat Baik
		Fragmentasi	4,25	Sangat Baik
			4,83	Sangat Baik
		Rata-Rata	4,65	Sangat Baik
	Total Rata-Rata	4,58	Sangat Baik	

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil penilaian empat dimensi yang terdiri dari beberapa indikator berdasarkan pertanyaan kuesioner, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan Dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Bogor telah dilaksanakan dalam kategori Sangat Baik dengan hasil skor 4,58.

Skor tertinggi dari responden untuk variabel implementasi kebijakan terletak pada dimensi komunikasi dengan skor 4,81, dimana indikator konsistensi memperoleh skor tertinggi yaitu 4,91. Sedangkan skor terendah diberikan responden untuk dimensi disposisi dengan hasil skor 4,25, dimana indikator insentif memperoleh skor 4,16. Hal ini mengindikasikan bahwa konsistensi pegawai dalam menjalankan program telah berjalan dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil skor yang dicapai yaitu 4,58, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan pelayanan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor telah berjalan dengan baik. Skor yang diperoleh telah memenuhi kategori "Sangat Baik", sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diartikan sudah berjalan dengan baik sesuai harapan

Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (2017), diketahui bahwa dalam mengimplementasikan Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor dalam dimensi Komunikasi ada tiga indikator yang sangat penting yaitu, penyampaian informasi kebijakan, kejelasan program, dan sosialisasi mengenai kebijakan. Penyampaian sosialisasi kebijakan merupakan penyampaian mengenai tindakan yang dilakukan Dinsos dalam melakukan tindakan sesuai dengan PERDA nomor 4 tahun 2022. Maka dari itu penyampaian sosialisasi kebijakan itu sangat penting agar berkurangnya gepeng.

Dalam dimensi Sumber Daya ada 4 indikator yaitu, Staff/Pegawai, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas. Dalam dimensi ini faktor pertama adalah Staf/Pegawai. Karena dengan jumlah Staff yang sedikit akan menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah ketersediaan fasilitas sarana prasarana yang belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program.

Dimensi Disposisi ada 2 indikator yaitu, insentif dan pengangkatan birokrat. Insentif yang diberikan di luar gaji/upah yang diberikan dapat mempengaruhi tindakan staff dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Dengan menambah biaya tertentu dapat memotivasi staf dalam melaksanakan perintah dengan baik.

Dimensi Struktur Birokrasi terdapat 2 indikator yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Struktur organisasi merupakan aspek penting dalam suatu lembaga. Apabila struktur organisasi telah dirancang dengan baik sesuai kemampuan setiap bagiannya, maka pelaksanaan program serta kegiatan di dalam lembaga tersebut akan berjalan

dengan lancar. Dengan kata lain, struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kapasitas masing-masing unsur di dalamnya akan mendukung terlaksananya semua kegiatan secara efektif. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan dari seluruh pegawai dan pembagian kewenangan, maka dengan adanya SOP yang baik dalam pembagian kewenangan serta memahami semua program yang telah dibuat, implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva & Ferry (2022) menggunakan teori model Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambat adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial, komunikasi antar badan pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang belum mendukung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Bogor evaluasi yang dilakukan terhadap program penanganan PMKS gelandangan dan pengemis yaitu kedepannya akan meningkatkan Sarana Prasarana. Sarana Prasarana yang ada sekarang terbatas, sehingga akan melakukan perbaikan/renovasi. Untuk evaluasi tahun depan akan ada pengadaan mobil ambulans. Dan rencana pelatihan untuk Tim Reaksi Cepat supaya nanti kalau ada penanganan yang sifatnya medis bisa langsung melakukan penanganan, dalam bentuk pengobatan P3K.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai

Dinas Sosial Kota Bogor di Bidang Rehabilitasi Sosial yang menyebabkan keterlambatan penjangkaran gepeng saat ada aduan masyarakat dan terhambat dalam implementasi peraturan yang ada. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada, seperti mobil penjangkaran gepeng hanya ada 1 mobil yang dimana itu menghambat jika banyaknya aduan masyarakat terhadap gepeng. Rumah singgah yang ada di Dinas Sosial Kota Bogor yang kecil membuat gepeng yang terkena penjangkaran terkadang berada di halaman kantor bidang Rehabilitasi Sosial. Perlu dilakukan optimalisasi kembali melalui peningkatan sosialisasi dan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan program. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial kota bogor, Selain itu, hasil penelitian juga bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2012). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. *Jurnal Ilmiah : Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 78-92.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 230-241.

- Dwidjoseputro, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Dwiyanto, Indiahono.(2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Eva, F. (2022), "Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8 (2) : 1-7
- Fadri, Z. (2019). Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (GEPENG) sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1-19.
- Farhati, M. Z., Saraswati, A., Septiana, M. P., Ramadhan, M., Salbiah, E., & Wahyudin, C. (2024). Strategi Pengembangan Organisasi untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1391-1403.
- Fitriyana, D., Assayuti, M. J., Laia, H. W., & Salbiah, E. (2024). Peran Kepemimpinan dalam Organisasi. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1747-1763.
- Kuntari, S., & Hikmawati, E. (2017). Melacak akar permasalahan gelandangan pengemis (gepeng). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 11-26.
- Masnul Alim, AG (2023). Implementasi Program Penanganan Penyambutan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan di Kota Bogor. *Epistemik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Indonesia*, 4 (1), 1-15.
- Usman,Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung. CV: Sinar Baru.
- Rosiana, K. (2017). Teknik komunikasi koersif dinas kesejahteraan sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi UNMUL*, 5(4), 109118.
- Rosiana, K. (2017). Teknik komunikasi koersif dinas kesejahteraan sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi UNMUL*, 5(4), 109118.
- Solichin Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, I. A. .(2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2012).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alphabet
- Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alphabet.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Therasari, A., Wahyudin, C., Seran, G. G., Ramdani, F. T., Rahmawati, R., & Apriliyani, N. V. (2024). Peran Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bawaslu. *Karimah Tauhid*, 3(7), 8164-8172.